

**LAPORAN HASIL ASSESSMENT
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
TAHUN 2015**



18 Maret 2016

PT MITRA KARYA PRIMA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI	1
A. SIMPULAN	1
B. REKOMENDASI	7
BAB II URAIAN HASIL ASSESSMENT	11
A. DATA UMUM	11
1. Dasar Assessment	11
2. Tujuan Assessment	11
3. Periode Assessment	11
4. Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG	12
5. Target KPI GCG	12
B. URAIAN HASIL SELF ASSESSMENT	13
1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola yang Baik Secara Berkelanjutan	14
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS	17
3. Aspek Dewan Komisaris	19
4. Aspek Direksi	24
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi	31
6. Aspek Lainnya	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ringkasan Hasil *Assessment* atas Penerapan *Good Corporate Governance* Tahun 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Assessment terhadap penerapan GCG pada PT Mitra Karya Prima (MKP) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi.

Assessment penerapan GCG dilakukan oleh Tim GCG PT PJB Services yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 106.K/020/DIR-PJBS/2015 tanggal 2 Juli 2014. Assessment dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 18 Maret 2016.

Penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada PT Mitra Karya Prima sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dan Petunjuk Teknis Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.

Proses pelaksanaan *Assessment* ini dilakukan oleh Tim GCG PT PJB Services terhadap penerapan GCG di lingkungan PT Mitra Karya Prima dan kemudian membuat laporan hasil *Assessment*.

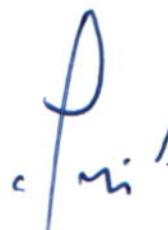
Berdasarkan self assessment penerapan praktik-praktik GCG yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT MKP mencapai predikat kategori "**Kurang Baik**" dengan skor 57,5260 dari skor maksimal 95.

Rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan, kami sampaikan secara lebih rinci dalam Uraian Hasil *Assessment*.

Sidoarjo, 18 Maret 2016



A.M. Budi Setyawan
Sekretaris PT PJB Services
(Selaku Ketua Tim GCG PT PJB
Services Tahun 2015)



Agus Priya Kusuma
Direktur Utama
(selaku Direksi Penanggung Jawab
dalam Penerapan dan Pemantauan GCG)

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

PT Mitra Karya Prima telah melakukan Assessment penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Indikator/Parameter Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara SK-16/S.MBU/2012 untuk periode tahun 2015, yang mencakup enam aspek *governance*, yaitu: Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, Aspek Pemegang Saham dan RUPS, Aspek Dewan Komisaris, Aspek Direksi, Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya.

Berdasarkan hasil self assessment terhadap penerapan GCG pada PT MKP untuk Tahun 2015 yang dilakukan sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 18 Maret 2016, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Mitra Karya Prima mencapai skor **57,5260** dari skor maksimal 95.

Capaian skor tersebut berada dalam kategori predikat "**Kurang Baik**". Capaian skor tersebut terinci sebagai berikut:

No.	ASPEK	BOBOT	SKOR	CAPAIAN (%)
I	KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	7,00	5,2820	75,00%
II	PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL	9,00	6,9510	77,00%
III	DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS	35,00	20,8560	60,00%
IV	DIREKSI	35,00	20,8620	60,00%
V	PENGUNGKAPAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI	9,00	3,5750	40,00%
VI	FAKTOR LAINNYA	0,00	0,0000	
	TOTAL SKOR	95,00	57,5260	

Hal-hal yang memerlukan penanganan **segera** oleh organ perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

- 1) GCG Code dan Code of Conduct belum dimutakhirkan secara berkala.
- 2) Laporan pelaksanaan assessment implementasi GCG belum terdokumentasikan secara baik.
- 3) Seluruh karyawan belum menandatangani pakta integritas yang memuat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku (COC).
- 4) Kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi belum memuat uraian tentang komitmen Dewan Komisaris dan Direksi.
- 5) Kebijakan pengendalian gratifikasi dan perangkat pendukungnya belum disosialisasikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan serta stakeholder lainnya
- 6) Perusahaan belum secara optimal melaksanakan kegiatan pengendalian gratifikasi dengan menggunakan perangkat yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
- 7) Perusahaan belum melaksanakan sosialisasi WBS kepada seluruh karyawan dan kepada stakeholder terkait.
- 8) Perusahaan belum menyediakan sarana/ media WBS secara memadai dan belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan WBS secara berkala.

2. Pemegang Saham dan RUPS

- 1) RUPS belum menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
- 2) RUPS belum mengesahkan RJPP
- 3) RUPS belum menetapkan secara eksplisit anggota Dewan Komisaris independen dalam keputusan pengangkatan Dewan Komisaris.
- 4) RUPS belum menetapkan pedoman penyusunan RKAP
- 5) RUPS belum menetapkan pedoman penyusunan RJPP
- 6) RUPS belum menetapkan Pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi (kolegial dan individual)
- 7) RUPS belum menetapkan formula perhitungan tantiem / insentif anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lain yang relevan
- 8) RUPS belum menetapkan pedoman penyusunan Laporan Tahunan